

JUDUL PROGRAM	: <b>PENGURANGAN EMISI DARI PERUNTUKAN LAHAN YANG BERKEADILAN, EFISIEN DAN BERKESINAMBUNGAN DI INDONESIA (FESERLUI): Mendukung Mata Pencaharian yang Berbasiskan Pepohonan, Penghitungan Karbon yang Transparan dan Dukungan Negosiasi bagi Masyarakat Lokal, LSM dan Badan Pemerintah.</b>
PENANGGUNG JAWAB	: SUYANTO
KERANGKA WAKTU	: 2009
PENDANAAN	: THE DAVID & LUCILE PACKARD FOUNDATION
JUMLAH	: US \$ 250.000
LOKASI	: JAVA, SUMATRA, KALIMANTAN, SULAWESI, DAN PAPUA
REKANAN	: WARSI, SEBAGAI REKANAN LSM UTAMA DI SUMATRA; LSM LOKAL LAINNYA AKAN DITENTUKAN BERDASARKAN PEMILIHAN WILAYAH CONTOH – FASILITASI PEMANGKU KEPENTINGAN LOKAL

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar dari penggunaan lahan dan perubahan penutupan lahan, dengan urutan ketiga dalam emisi keseluruhan terbesar dan tingkat emisi per kapita diantara Amerika Utara dan Eropa. Dua tahun waktu penguatan pembelajaran disetujui di Peta Jalan Bali pada Desember 2007, yang diharapkan dapat membawa pada kesepakatan internasional mengenai penguatan rezim pengurangan emisi pasca-Kyoto. Indonesia merupakan target utama bagi upaya internasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang (REDD), meskipun bagian yang penting dari emisi rawa gambut memerlukan interpretasi yang lebih luas dari istilah "hutan" yang saat ini menggunakan definisi yang diterima secara internasional.

Emisi di Indonesia, setidaknya sebagian disebabkan oleh peraturan yang tumpang tindih dan pelaksanaan hukum yang lemah, menuntut penguatan dari sistem timbal balik antara pusat dan daerah melalui pemerintah dan masyarakat sipil. Fokus terhadap wilayah dengan batas dasar emisi yang tinggi mungkin "efisien", tapi pemangku kepentingan yang terikat dengan perlindungan hutan jangka panjang mungkin tidak merasa ini sebagai sesuatu yang "adil". Pengurangan emisi di Indonesia yang adil, efisien dan berkesinambungan memerlukan dukungan bagi mata pencaharian yang berbasiskan pohon yang meminimalkan pertukaran antara mata pencaharian daerah dan perlindungan cadangan karbon. Secara kelembagaan, hal ini memerlukan transparansi dari perhitungan karbon dan sokongan negosiasi bagi masyarakat lokal, LSM dan badan pemerintah.

Tujuan khusus program:

1. Mendukung proses pembelajaran bagi pemangku kepentingan setempat, setidaknya di 5 bentang

lahan yang mewakili Indonesia, dalam mengenali rangkaian nilai (*value chain*) yang terlibat dalam insentif berdasarkan pasar untuk mempertahankan dan meningkatkan cadangan karbon permukaan, dengan menggunakan perbedaan antara "berkeadilan dan efisiensi",

2. Mendukung analisa sistematis dari keadaan setempat dan mencari penyelesaian yang inovatif dalam kombinasi kelembagaan dari mekanisme A/R CDM dan REDD dalam mendukung perbaikan mata pencaharian berdasarkan skala bentang lahan di berbagai wilayah di Indonesia,
3. Mendukung munculnya pedoman dan pengawasan antara pemangku kepentingan nasional dan masyarakat setempat melalui perhitungan dan pengawasan yang menghubungkan jaringan dari data "fakta lapangan" dengan metode pengamatan berbasiskan satelit.

Hasil yang diharapkan dari program ini antara lain:

- Jaringan "bentang lahan pembelajaran" dengan pemangku kepentingan setempat yang lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam negosiasi tingkat nasional mengenai REDD dan mekanisme perhitungan karbon yang sama.
- Rancangan dari materi komunikasi yang lebih efektif berdasarkan atas bagaimana cara pemangku kepentingan belajar dalam menghargai kebutuhan untuk menyeimbangkan efisiensi dan berkeadilan dalam mekanisme penerapan REDD.
- Versi umum yang telah ditingkatkan dari alat penilaian tingkat cadangan karbon di suatu bentang lahan dan pembuatan konsep mengenai tata cara finansial dan insentif lainnya berdasarkan atas timbal balik dari para pengguna.